

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 6, Juni 2024, Halaman 758-767
Licensed by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.12680344)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12680344>

Pemikiran Al-Mawardi; Kritik Terhadap Konsep Politik Nicollo Machiavelli

Raihanna Aqilah M^{1*}, Nurhikma¹, Kurniati¹

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Email korespondensi: 10200122114@gmail.com

Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah perbedaan mendasar antara dua tokoh dalam hal etika, moralitas, dan tujuan politik. Machiavelli dikenal dengan pragmatisme dan amoralitas dalam strategi politiknya, sementara Al-Mawardi menekankan pentingnya integritas moral dan prinsip-prinsip agama dalam pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi konsep politik Niccolò Machiavelli melalui pemikiran Al-Mawardi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis isi. Sumber data mencakup karya utama kedua tokoh serta literatur sekunder yang relevan. Teknik analisis data melibatkan analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam karya-karya mereka serta metode komparatif untuk membandingkan pemikiran politik keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Al-Mawardi memberikan kritik tajam terhadap pragmatisme Machiavelli, menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam politik yang dapat menjadi panduan bagi para pemimpin kontemporer dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Politik, Al Mawardi, Nicollo Machiavelli.*

Abstract

The background to this research is the fundamental differences between the two figures in terms of ethics, morality and political goals. Machiavelli was known for his pragmatism and amorality in his political strategy, while Al-Mawardi emphasized the importance of moral integrity and religious principles in government. This research aims to criticize Niccolò Machiavelli's political concept through Al-Mawardi's thoughts. The research method used is a qualitative approach with literature study and content analysis. Data sources include the main works of the two figures as well as relevant secondary literature. The data analysis technique involves content analysis to identify the main themes in their works as well as comparative methods to compare their political thinking. The results of the research show that Al-Mawardi's thinking provides a sharp critique of Machiavelli's pragmatism, emphasizing the importance of ethics and morality in politics which can be a guide for contemporary leaders in achieving justice and social welfare.

Keywords: *Politik, Al Mawardi, Nicollo Machiavelli.*

Article Info

Received date: 25 Juni 2024

Revised date: 28 Juni 2024

Accepted date: 30 Juni 2024

PENDAHULUAN

Pemikiran politik merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam sejarah intelektual manusia. Dua tokoh yang sering dibicarakan dalam konteks ini adalah Al-Mawardi dan Niccolò Machiavelli. Al-Mawardi, seorang ulama dan cendekiawan Muslim yang hidup pada abad ke-11, dan Niccolò Machiavelli, seorang filsuf politik Italia dari abad ke-16, menawarkan perspektif yang sangat berbeda mengenai pemerintahan dan kekuasaan. Kritik terhadap konsep politik Machiavelli oleh Al-

Mawardi menawarkan pandangan yang menarik dan komprehensif, terutama dalam konteks perbandingan antara perspektif Islam dan Barat mengenai etika dan moralitas dalam politik.

Al-Mawardi, yang nama lengkapnya adalah Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, adalah seorang pemikir politik, teolog, dan ahli hukum dari Basra, Irak. Karya-karyanya yang paling terkenal termasuk "Al-Ahkam al-Sultaniyyah" (Hukum Pemerintahan) yang memberikan panduan rinci tentang tata cara pemerintahan dalam Islam. Al-Mawardi hidup dalam konteks pemerintahan Abbasiyah yang mengalami banyak tantangan baik dari segi internal maupun eksternal. Ia berusaha untuk memberikan panduan tentang bagaimana pemerintahan Islam seharusnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pandangannya, kekuasaan harus dijalankan berdasarkan keadilan, moralitas, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah.¹

Di sisi lain, Niccolò Machiavelli, dalam karya terkenalnya "Il Principe" (Sang Pangeran), mengemukakan pandangan yang pragmatis dan sering kali dianggap amoral tentang kekuasaan dan pemerintahan. Machiavelli berpendapat bahwa penguasa harus siap melakukan apa saja, termasuk tindakan-tindakan yang tidak bermoral, demi menjaga kekuasaan dan stabilitas negara. Prinsip-prinsipnya seperti "tujuan menghalalkan cara" (the ends justify the means) dan pentingnya kekuasaan dan kecakapan dalam politik telah memicu banyak perdebatan dan kontroversi. Bagi Machiavelli, politik adalah seni untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan tanpa memperhatikan moralitas konvensional.²

Kritik terhadap konsep politik Machiavelli dari perspektif Al-Mawardi dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Pertama, dari sudut pandang etika dan moralitas. Al-Mawardi menekankan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan keadilan dan moralitas yang tinggi, yang berarti penguasa tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum-hukum Allah. Dalam pandangan Al-Mawardi, tujuan tidak dapat menghalalkan cara jika cara tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan hukum Islam.³

Selain itu, Al-Mawardi juga mengkritik pandangan Machiavelli yang cenderung mengabaikan peran agama dalam politik. Dalam ajaran Islam, agama dan politik tidak dapat dipisahkan. Al-Mawardi percaya bahwa seorang pemimpin harus menjalankan kekuasaannya dengan dasar-dasar agama untuk mencapai keberkahan dan keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Machiavelli dianggap terlalu sekuler dan pragmatis tanpa mempertimbangkan nilai-nilai spiritual dan moral yang esensial dalam menjalankan pemerintahan.⁴

Perbandingan antara konsep kekuasaan menurut Al-Mawardi dan Machiavelli juga menarik untuk dikaji. Machiavelli melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan dan dipertahankan dengan segala cara, termasuk melalui tipu daya dan kekerasan jika diperlukan. Sebaliknya, Al-Mawardi melihat kekuasaan sebagai amanah dari Allah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan. Bagi Al-Mawardi, kekuasaan bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk menegakkan hukum-hukum Allah dan mencapai kesejahteraan masyarakat.⁵

Kritik Al-Mawardi terhadap Machiavelli memiliki implikasi yang signifikan terhadap politik modern, terutama dalam konteks dunia Islam dan hubungan internasional. Pemikiran Al-Mawardi menekankan pentingnya integritas moral dan etika dalam politik, yang dapat menjadi panduan bagi para pemimpin Muslim dalam menjalankan pemerintahan mereka. Di sisi lain, pragmatisme Machiavelli sering kali dianggap relevan dalam konteks politik realis di dunia Barat, di mana strategi dan kecakapan politik dianggap lebih penting daripada nilai-nilai moral.

Latar belakang sejarah dan pemikiran kedua tokoh ini menunjukkan betapa berbedanya pandangan mereka mengenai kekuasaan dan pemerintahan. Kritik Al-Mawardi terhadap konsep politik Machiavelli bukan hanya menawarkan perspektif alternatif, tetapi juga menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam politik. Dalam dunia yang semakin kompleks dan terpolarisasi, refleksi terhadap pemikiran kedua tokoh ini dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan demi mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.

¹ Mohammad Hashim. Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*. (Cambridge: Islamic Texts Society., 1991).

² Isaiah Berlin, *Against the Current: Essays in the History of Ideas*. (Princeton: Princeton University Press., 1980).

³ Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah (The Ordinances of Government)*. (Reading: Garnet Publishing, 1996).

⁴ Antony Black, *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present*. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001).

⁵ Patricia. Crone, *Medieval Islamic Political Thought*. (Edinburgh: Edinburgh University Press., 2005).

Dengan latar belakang inilah, penelitian tentang kritik pemikiran Al Mawardi terhadap Niccolò Machiavelli disusun. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perbedaan pandangan kedua pemikir tersebut, mengidentifikasi kritik-kritik yang mungkin diajukan oleh Al Mawardi terhadap pemikiran Machiavelli. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip etika dan pragmatisme dalam politik.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis isi. Sumber data terdiri dari sumber primer seperti karya utama Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyyah, dan karya utama Machiavelli, *Il Principe* (The Prince), serta sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, tesis, dan disertasi yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi, mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data melibatkan analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam karya-karya Al-Mawardi dan Machiavelli, serta metode kritis-historis untuk memahami konteks sejarah dan sosial dari pemikiran kedua tokoh ini. Selain itu, metode komparatif digunakan untuk membandingkan pemikiran politik Al-Mawardi dengan konsep politik Machiavelli, mengidentifikasi perbedaan dan persamaan di antara keduanya.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk melengkapi analisis normatif dengan mengeksplorasi bagaimana norma-norma hukum tersebut diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat. Melalui metode ini, penelitian akan mengumpulkan data lapangan seperti wawancara, survei, dan observasi partisipatif untuk mendapatkan wawasan tentang persepsi, sikap, dan praktik masyarakat terkait dengan hukum yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan antara teori hukum dan praktik nyata di lapangan, serta faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi implementasi hukum syariah. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas dan penerimaan hukum syariah dalam konteks sosial yang lebih luas.

METODE

Metodologi penelitian yang peneliti pakai dengan metode kualitatif. Metodologi kualitatif merupakan metode yang memungkinkan peneliti melihat pengalaman secara detail, dengan menggunakan metode tertentu seperti observasi, analisis isi, metode virtual dan biografi.⁶ Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi masalah dari sudut pandang peneliti dan memahami makna dan interpretasi yang digunakan dalam tindakan peristiwa atau objek.

Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang digunakan oleh penulis. Penelitian kepustakaan dapat didefinisikan sebagai penelitian yang berfokus pada penelitian dan diskusi bahan pustaka, seperti buku, kitab, dan jurnal, yang berkaitan dengan subjek penelitian, atau penelitian yang menggunakan buku sebagai sumber informasi. Terlepas dari fakta bahwa penelitian ini bersifat deskriptif, tujuan penulis adalah untuk menunjukkan dan menjelaskan ide-ide Al-Mawardi. Selain melakukan metode kepustakaan dapat memakai sumber primer dan sumber sekunder, penelitian skripsi, penelitian kualitatif yang dikembangkan menurut metode ilmiah.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi.

1. Al- Mawardi

Nama lengkap al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Ia lahir di Basra pada tahun 364 H/975 M, dan wafat di Bagdad pada tahun 450 H/1058 M. Ia adalah seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi'i, dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Sungguhpun demikian, ia termasuk penulis produktif, cukup banyak bukunya dalam berbagai bidang ilmu,

⁶Tuty Mutiah, "Metode Penelitian Komunikasi (Kualitatif)," *Bina Sarana* 1, no. 1 (2021): 1–114, h. 15.

⁷Eka Nam Sihombing, dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Intrans Publishing, 2022), h.48.

mulai dari ilmu bahasa, sastra, tafsir sampai dengan ketatanegaraan.⁸ al-Mawardi dibesarkan di Bagdad, dan dari ulama-ulama terkemuka di wilayah tersebut ia mempelajari dan mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Diantara guru-gurunya adalah; al-Hasan Ibnu Ali al-Hambali, Muhammad Ibnu Adi alMuqri, Muhammad Ibnu al-Ma'ali al-Asdi, Ja'far Ibnu Muhammad Ibnu al-Fadl al-Baghadi, dan Abu Hamid al-Isfiraini. Gurunya yang terakhir ini amat berpengaruh pada diri al-Mawardi. Pada gurunya itulah ia mendalami mazhab Syafi'i dalam kuliah rutin yang diadakan di sebuah masjid yang terkenal dengan masjid Abdullah Ibnu al-Mubarak, di Bagdad. Kedalaman ilmu dan ketinggian akhlak al-Mawardi telah membuat ia terkenal sebagai seorang panutan yang disegani dan berwibawa dikalangannya, baik oleh masyarakat umum, maupun oleh pihak pemerintah. Oleh sebab itu, ia beberapa kali ditunjuk sebagai hakim kerajaan di Bagdad dalam pemerintahan Abbasiyah. Dan pada masa al-Qadir berkuasa (381 H/991 M – 423 H/1031 M) karir al-Mawardi meningkat, yaitu ia diangkat menjadi hakim agung (qadi alqudat), penasihat raja atau khalifah di bidang agama dan pemerintahan. Disamping itu ia juga mengajar, banyak ulama terkemuka sebagai hasil dari bimbingannya. Diantaranya; Abu al-Ainain Kadiri dan Abu Bakar al-Khattib. Disamping mengajar, kegiatan ilmiah yang ditekuninya adalah mengarang. Banyak kitab-kitab berharga yang diwariskan dalam berbagai bidang, seperti ushul fiqh, fiqh, hadits, tafsir, fiqh siyasah. Pada fiqh siyasah ini namanya menonjol karena bahkan sampai sekarang menjadi referensi untuk ilmu politik dan pemerintahan menurut fiqh Islam. al-Mawardi berijtihad dan menyusun sebuah kerangka politik tentang apa yang harus dilakukan dalam suatu pemerintahan, seperti ketentuan pokok dalam pengangkatan seorang khalifah, tugas-tugas khalifah dan pejabat negara, dan hubungan negara dengan rakyat.⁹

2. Nicollo Machiavelli

Niccolo Machiavelli dilahirkan di Kota Florence di Italia pada 1469, pada zaman renaissance (abad pencerahan). Pada masa itu Italia terbagi menjadi lima negara; kerajaan Naples di sebelah selatan, kepangeranan Milan di sebelah barat, republik Venice di timur, Negara Paus di tengah, dan republik Florence yang diduduki Machiavelli. Machiavelli dibesarkan dalam keluarga bangsawan yang termasyhur. Ayahnya Bernardo Machiavelli adalah seorang pengacara yang terkadang menangani urusan publik di negara-kota Florence. Ayahnya membantu Machiavelli untuk menikmati pendidikan yang terbaik pada waktu itu di Florence, karena ayahnya menginginkan kelak Machiavelli menjadi seorang terkemuka, sehingga pantas bila ayahnya mendidik Machiavelli untuk mempelajari ilmu-ilmu kemanusiaan. Machiavelli sendiri kemudian berkembang menjadi seorang politikus dengan ide-ide yang konkrit, praktis, dan peka terhadap prioritas-prioritas tindakan, bahkan disebut oleh para politikus bahwa Machiavelli adalah seorang politikus realisme. Pada usia 25 tahun, dia telah berkecimpung dengan kehidupan politik. Machiavelli pernah menjabat kedudukan tinggi dalam bidang diplomatik, dalam mengatur organisasi ketentaraan, serta mengurus korespondensi resmi negaranya. Machiavelli pernah dipenjara dan dibuang karena dianggap sebagai komplotan anti pemerintahan tahun 1513. Setelah dibebaskan kembali dia memencilkan diri di sebuah tanah pertanian di luar kota. Disanalah dia menuangkan gagasan-gagasannya ke dalam bentuk tulisan, mulai dari seri tentang politik, sampai kepada komedi salah satu karya politiknya adalah *The Discourses* dan *The Prince* (Sang Pangeran).¹⁰

Kejadian-kejadian politik semenjak dia menganyaman pendidikan sampai ketika dia diasingkan oleh keluarga Medici sehingga meninggalkan kesan yang mendalam pada Machiavelli. Tokoh politik ini menyaksikan runtuhnya kekuasaan keluarga Medici yang sudah memerintah Negara Florence selama beberapa generasi sekitar seratus tahun. Dia juga melihat runtuhnya suatu kekuasaan Republik Florence yang tidak mendapat dukungan dari rakyat biasa, dan itu semua menjadi pengalaman politik yang berharga baginya, sehingga dia menuangkan kejadian itu semua dalam karya politiknya.¹¹

⁸ Mauliana Maghfiroh, *Al Mawardi's Social Contract Theory (Study of Al Mawardi's Political Thought)* (Journal of Islamic Studies and Humanities, 2023).

⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkām As-Ṣulṭāniyyah Wal Wilāyāt Ad-Diniya* (Beirut: Dār al-Fikr, 1960).

¹⁰ Marcel Kelemen, *The Political Realism of Niccolò Machiavelli* (The Review of European Affairs, 2017).

¹¹ Sutomo, *Kontribusi Pemikiran Al-Mawardi Terhadap Konsep Kepemimpinan Dalam Islam* (Jurnal Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

Dalam karya-karyanya, Machiavelli mengakui bahwa dia menggeneralisasikan konsepnya itu berdasarkan fakta, bukan seperti penulis- penulis pada zamanya yang lebih menekankan penulisan konsep-konsep yang sepenuhnya berdasarkan kajian-kajian kuno warisan dari Plato dan Aristoteles. Machiavelli menulis karyanya berdasarkan situasi dan kondisi Florence kala itu. seperti kondisi lingkungan, pengaruh pendidikan, dan juga berdasarkan pengalaman politiknya. Seperti yang dikatakan oleh pakar sosiolog Islam yaitu Ibnu Khaldun, yang menyatakan bahwa watak politik seseorang itu dipengaruhi juga oleh kondisi geografis, seperti cuaca, kondisi politik, dan kondisi lingkungan sekitarnya. Hal ini pun senada dengan apa yang terjadi pada Machiavelli dimana watak politiknya, hingga bisa melahirkan karya sebesar *The Prince*, dan *The Discourses*. Dimana hal ini dipengaruhi beberapa sebab diantaranya.¹²

B. Konsep etika politik menurut Nicollo Machiavelli Dan Al- Mawardi

1. Konsep etika politik Nicollo Machiavelli

Dalam pembahasannya mengenai etika berkuasa ini, Machiavelli mendasarkan pengertian etika pada dua hal, yaitu etika Barat Kuno, yang berasal dari budaya Romawi Kuno, dan yang kedua adalah etika Katholik, yang merupakan doktrin dari gereja Katholik Roma. Ia lebih berpegang pada etika Barat Kuno yang berasal dari Romawi. Hal ini didasarkan pada pemikirannya bahwa untuk mempertahankan kekuasaan kekuatan semangat untuk bertempur haruslah diunggulkan, seperti halnya pada masa Julius Cesar atau Cesare Borgia, seorang penguasa Florense sebelum kelahiran Machiavelli yang sangat licik dan gila kekuasaan. Ia menganggap etika Katholik tidak mendatangkan manfaat itu. Ia menyatakan bahwa etika Katholik hanya menjadikan manusia lemah karena hanya mengorientasikan hidupnya pada hal-hal yang berbau akherat.¹³ Hal ini menurutnya tidak memberikan kontribusi nyata dalam pertarungan politik dan kekuasaan. Meski begitu, ia tidak menolak secara tegas mengenai etika Katholik ini, namun etika ini bisa digunakan sebagai tujuan pragmatis dalam kekuasaan, seperti misalnya untuk menyatukan rakyat. Dalam bukunya khususnya pada bab ke 17 sampai bab ke 20 ia memberikan nasihatnya kepada penguasa waktu itu mengenai bagaimana ia harus bersikap terhadap rakyat dan cara berdiplomasi terhadap raja-raja kerajaan lainnya. Pada bab ke 17, ia menjelaskan bahwa seorang pangeran harus menimbulkan rasa cinta dan ketakutan dari rakyatnya kepadanya. Namun, bila hal ini sulit dilakukan, ia menyatakan bahwa seorang pangeran lebih baik ditakuti dari pada dicintai oleh rakyatnya.¹⁴

Kemudian ia juga menyatakan untuk tidak menjadi seorang yang mulia. Karena itu, menurutnya, akan menjadikannya lemah dan hina, dan bila demikian maka wibawanya akan jatuh dihadapan rakyat. Selanjutnya, juga tidak bersikap baik, karena itu akan menumbuhkan rasa pemberontakan dari rakyatnya karena menganggap sang raja tidak tegas dan tidak berani. Sedangkan dengan kekerasan, akan menstabilkan peraturan dan menghindarkan kekacauan.¹⁵ Mengenai kerelaan rakyat, Machiavelli mengatakan agar pangeran untuk tidak selalu berpedoman pada hal tersebut, karena kerelaan dan keinginan mereka selalu berubah-ubah, maka dari itu agar selalu berpedoman pada kekuatannya, karena bila ia konsisten pada kekuatannya, maka kekuasaannya akan bertahan. Dalam bukunya, Deliar Noer mengutip pernyataan Machiavelli dalam hal keahlian pangeran. Ia menjelaskan bahwa setiap pangeran haruslah tidak menyibukkan pada hal-hal yang lain kecuali kemahiran berperang. Sebab menurutnya, keahlian itulah yang diperlukan dalam memerintah.

Machiavelli menyadari bahwa hal ini memang terdengar tidak baik, namun, hal ini tidak baik bila semua manusia berkepribadian baik. Tapi pada kenyataannya, menurutnya, manusia itu tidak baik. Mereka selalu melakukan hal-hal yang buruk, ingkar janji, tamak kekuasaan, pembohong, munafik, dan lain sebagainya. Bahkan ia menggambarkan bahwa manusia-manusia itu tidak akan terlalu marah bila ayahnya terbunuh, namun bila mereka

12 Quentin. Skinner, *Machiavelli: A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2000).

13 Abdul Hidayat, *Perbandingan Pemikiran Politik Al-Mawardi Dan Niccolò Machiavelli* (Jurnal Studi Islam dan Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020).

14 Niccolò Machiavelli, *The Discourses*. "Translated by Leslie J. Walker" (London: Penguin Books, 1970).

15 Agus Pranowo, *Kritik Al-Mawardi Terhadap Machiavelli: Analisis Teori Politik Islam* (Jurnal Pemikiran Islam, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019).

kehilangan harta atau warisannya, mereka akan benar-benar *father than the loss of their patrimony*.” Mengenai politik luar negerinya, Machiavelli menekankan pada kelihaihan pangeran dalam hal berdiplomasi. Ia menyatakan bahwa seorang pangeran dalam berdiplomasi harus memakai muslihat singa dan rubah (kancil). Singa sebagai raja hutan memiliki kekuasaan dikarenakan kekuatannya dan kebuasannya sehingga hewan-hewan lainnya takut. Kemudian, kelihaihan rubah dalam tipu muslihat mampu menyelamatkan dirinya dari jebakan hewan lain atau dari pemburu. Dua hal ini yang ditekankan oleh Machiavelli kepada penguasa dalam berdiplomasi dengan kerajaan-kerajaan lain. Ia menganggap bahwa dunia ini bagaikan hutan belantara dengan manusia-manusia di dalamnya seperti apa yang ada dalam hutan. Ia tidak harus menepati janjinya bila memang hal itu tidak mendatangkan keuntungan baginya. Ia harus bersikap seolah-olah baik dihadapan raja-raja lain, meski pada hakikatnya belum tentu baik, atau bagaikan serigala berbulu domba. Ia mengingatkan bahwa raja-raja lain pun berfikir sama. Mereka juga tidak akan menepati janjinya, akan berkhianat bila waktunya tepat. Maka dari itu, ia harus betul-betul bermain seperti halnya rubah atau kancil dalam bertipu muslihat. Namun, bila hal itu pun tidak berhasil, maka kekuatan singa dimunculkan, atau dengan kata lain, gendang perang perlu ditabuh.¹⁶

Inilah beberapa nasehat Machiavelli pada Lorenzo De Medici, penguasa Florentina waktu itu. Ia menekankan bahwa tujuan menghalalkan segala cara. Untuk mempertahankan kekuasaan di tengah persaingan perebutan kekuasaan, segala cara bisa digunakan asal sesuai dengan tujuan dan maksud penguasa. Bahkan bila hal itu mengharuskan kekejaman sekalipun. Namun meski begitu, ia tidak menafikkan moral dan agama secara keseluruhan. Ia hanya menganggap bahwa moral dan agama tidak terlalu memberikan efek positif dalam hal kekuasaan dan pemerintahan. Kecuali jika memang keduanya bisa memberikan manfaat dalam maksud dan tujuan kekuasaan, barulah keduanya bisa digunakan.¹⁷

2. Konsep etika politik Al-Mawardi

Memahami pemikiran al-Mawardi bisa dilakukan dengan membaca karyanya yang berjudul *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, sebagai masterpiece-nya. Di dalam magnum opus-nya ini tertulis prinsip-prinsip politik kontemporer, kekuasaan, yang pada masanya merupakan pemikiran yang maju, bahkan hingga masa kini sekalipun. Pemikiran politiknya dilandasi dengan kerangka teori politik yang berdasarkan prinsip Islam (fiqh), sesuai dengan disiplin ilmu yang dialaminya. Artinya, pemikiran politiknya berdasarkan pada kerangka teori politik yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.¹⁸

Al-Mawardi sangat berjasa dalam menghimpun dasar ajaran Islam serta berbagai pendapat para fukaha pendahulunya, lalu menyusunnya menjadi rumusan logis dan sistematis, sehingga menjadi teori dan pegangan yang memiliki kekuatan hukum dalam pandangan masyarakat Islam di zaman berikutnya. Namun, sebagai seorang mujtahid, ia tidak hanya mengumpulkan pendapat para ulama pendahulunya, tetapi dengan kejeniusannya ia juga berjihad dalam berbagai masalah. Terkadang ia menghasilkan pendapat baru yang orisinal, yang terkadang juga berlainan dengan beberapa pendapat sebelumnya. Hubungan Agama dan Negara Salah satu pokok pemikiran al-Mawardi adalah mengenai hubungan antara agama dan negara. Mayoritas proses pembentukan negara yang dikemukakan ulama Muslim dipengaruhi oleh pemikiran filsafat politik para ilmuwan Yunani seperti Plato dan Aristoteles, yang lebih mengutamakan aspek logika daripada aspek religius (agama).¹⁹ Mengenai asal mula timbulnya sebuah negara, pandangan al-Mawardi berbeda dengan Plato, Aristoteles, dan Ibnu ‘Arabi yang tidak memasukkan unsur agama dalam teori politiknya. Menurutnya, kehidupan beragama tidak bisa dipisahkan dari negara. Selain itu, al-Mawardi berpandangan bahwa dalam pembentukan sebuah negara, manusia harus melakukan kerja sama dengan yang lainnya, karena manusia sebagai makhluk sosial, makhluk yang memiliki tabiat alami untuk

16 Ahmad. Hassan, *Perbandingan Pemikiran Politik Barat Dan Islam: Al-Mawardi vs Machiavelli* (Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016).

17 John M Najemy, *Machiavelli and Italy* (Journal of Modern Italian Studies, 2006).

18 M. Qomaruddin, *Pemikiran Politik Al-Mawardi: Studi Kritis Terhadap Al-Ahkam As-Sultaniyyah* (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta., 2015).

19 Mustofa Abdullah, *Kritik Politik Machiavelli Dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Pemikiran Al-Mawardi* (Penerbit Mizan, Bandung, 2017).

bermasyarakat, dan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bantuan orang lain. Dengan adanya keberagaman, pembawaan, perbedaan bakat, kecenderungan alami, serta kemampuan yang menjadikan manusia bersatu dan saling membantu hingga akhirnya sepakat membentuk negara. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam al-Qur'an bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Dengan sifat lemah tersebut Allah menghendaki agar manusia tidak menjadi sombong, arogan, dan tidak berperasaan serta tidak tahu ukuran diri.²⁰

Dalam hal ini, al-Mawardi juga menambahkan bahwa ikatan sosial ini akan benar-benar efektif dalam meredam konflik yang timbul dari dalam sekaligus mampu menimbulkan kesejahteraan bagi warganya apabila dalam ikatan-ikatan tersebut juga terdapat sendi-sendi dasar utama bagi tegaknya stabilitas sosial dan politik sehingga kemakmuran menjadi merata di antara mereka. Dalam pandangan al-Mawardi, berdirinya negara itu membutuhkan enam sendi utama. Sendi yang pertama adalah agama. Keyakinan agama sebagai pedoman dan sendi dasar kehidupan bermasyarakat yang paling utama dan paling mampu membangkitkan semangat membangun dan melestarikan alam. Adapun fungsi agama adalah sebagai kekuatan moral yang dapat mengendalikan keinginan dan hawa nafsu manusia, sekaligus merupakan pengontrol dan pengendali keinginan-keinginan manusia yang bermacam-macam, sehingga ia menjadi fondasi yang kokoh untuk menciptakan kesejahteraan, ketenangan jiwa dan negara. Sendi yang kedua adalah penguasa kharismatik. Kekuasaan yang berwujud lahir dari pemimpin yang bijak. Seorang pemimpin atau penguasa harus mempunyai kharisma berwujud, dan dapat diteladani. Dengan wibawanya, ia punya otoritas yang melekat pada dirinya yang dapat menjadi pemersatu bagi aspirasi-aspirasi masyarakat yang berbeda. Sendi yang ketiga adalah keadilan menyeluruh.²¹ Keadilan merupakan syarat yang sangat penting, karena dengan keadilan yang merata akan tercipta kerukunan sesama warga negara, menumbuhkan rasa hormat, ketaatan kepada pemimpin, menyemarakkan kehidupan rakyat yang tenteram, dan menumbuhkan karya dan prestasi masyarakat. Sendi yang keempat adalah keamanan yang kuat dan menjamin. Keamanan yang kuat dan menjamin akan memberi inner peace (kedamaian batin atau ketenangan jiwa), Sendi yang kelima adalah kesuburan tanah. Kesuburan tanah dapat menjamin kebutuhan pangan warga negara. Adanya kepastian berusaha dan mencari kebutuhan hidup bagi rakyat, negara harus menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pengembangan usaha negara dan rakyat, sehingga rakyat dapat hidup layak dan sejahtera, serta konflik antarpenduduk pun dapat teratasi. Adapun sandi yang keenam adalah harapan. Harapan bagi kelangsungan hidup generasi saat ini dengan generasi setelahnya sangat bergantung pada sistem pengaturan negara oleh pengelola dan penyelenggaraan negara dengan kualifikasi sebagaimana terdapat secara berurutan pada sendi-sendi sebelumnya. Keenam sendi dasar tersebut merupakan pilar-pilar penyangga utama bagi kehidupan bermasyarakat dan selalu menjadi prinsip-prinsip dasar membangun komunitas sosial. Maka, tampaklah bahwa agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu antara keduanya berhubungan secara timbal balik dan saling membutuhkan. Dan ini berarti bahwa agama membutuhkan Negara. Bersama negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara membutuhkan agama karena dengan agama negara bisa mendapatkan bimbingan etika dan moral. Terkait hal ini, al-Mawardi menggambarkan secara jelas dengan hubungan agama dan negara, "Kekuasaan akan kekal dengan agama dan agama akan kuat dengan kekuasaan".²²

Etika Politik al-Mawardi antara Kekuasaan dan Moralitas Dalam pemikiran politik Islam, istilah-istilah "al-amr", "al-hukm", dan "al-mulk" seringkali dipakai dalam al-Qur'an untuk menunjukkan arti kekuasaan, baik yang dimiliki Allah, Rasulullah SAW, khalifah, atau para pemegang kekuasaan-kekuasaan yang lain. Hanya saja, secara tegas al-Qur'an juga menyatakan bahwa kekuasaan itu berada di tangan Allah. Rasulullah SAW, sultan, ataupun seorang raja, hingga kepala negara, hanyalah orang-orang yang diamanahi suatu kekuasaan oleh Allah. Mehdi Muzaffari mengatakan bahwa Allah adalah dasar bagi konstruksi teoretis apapun yang berkaitan dengan negara dan politik Islam. Allah tidak semata-mata memiliki suatu makna dan konotasi teologis, tetapi juga makna politis yang sangat mendalam.

²⁰ Arif. Zaid, *Political Thought of Al-Mawardi: Theory and Practice* (International Journal of Humanities and Social Science, 2014).

²¹ Fajar. Rahmat, *Relevansi Pemikiran Politik Al-Mawardi Di Era Modern* (Jurnal Politik Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang., 2021).

²² Khairul. Ahmad, *The Political Philosophy of Al-Mawardi: An Analytical Study* (Journal of Islamic Thought and Civilization, 2016).

Ajaran Islam sebagai ajaran yang mengedepankan moderasi beragama dalam konsepnya,²³ Islam tidak ada dikotomi antara politik dan etika atau moral, tetapi justru memadukannya. Imam al-Ghazali berpandangan bahwa akhlak merupakan sesuatu yang inti dalam praktik politik. Oleh karenanya, setiap manusia berpartisipasi dalam praktik politik agar melaksanakan akhlak sebaik-baiknya. Al-Mawardi telah mempraktikkan teori-teorinya agar tidak terkesan utopis, baik dalam tatanan etika maupun politik. Sehingga, seorang khalifah atau imam (kepala negara) dapat meneladaninya dengan mengaktualisasi sikap atau komitmen keagamaan dan politiknya, yang mungkin diikuti perubahan perilaku masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Demikianlah al-Mawardi menggambarkan kesatuan antara politik dan etika yang harus diterapkan kepala negara agar kehidupan masyarakatnya terus membaik. Dalam Tashîl al-Nazhar, al-Mawardi berpesan kepada para penguasa untuk senantiasa berperilaku yang mulia. Beliau mengatakan bahwa seseorang yang dipercaya memegang kekuasaan harus selalu mengutamakan akhlaknya dan memperbaiki tingkah lakunya. Hal ini harus menjadi prinsip kekuasaannya. Ia juga berpesan agar para penguasa senantiasa berpegang teguh pada agama dalam berbuat dan bertindak laku. Akhlaknya harus mulia karena semua itu akan mendatangkan kemuliaan dan kebaikan baginya, juga bagi dan negaranya. Selain itu, seorang penguasa harus menghindari sikap sombong karena kebesaran seorang penguasa (pemimpin dinilai dari apa yang telah ia kerjakan, bukan dari kesombongannya di hadapan rakyat. Di sisi lain, al-Mawardi mengharapkan agar para penguasa lebih memerhatikan sekaligus berhati-hati terhadap saran dan masukan para pembisik yang munafik. Ia harus belajar mengenali dan memilah antara penasihat yang dapat dipercaya dengan penasihat munafik yang selalu mengutamakan kepentingannya saja. Penguasa haruslah senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan tercela dan selalu mengutamakan kemuliaan akhlak dan jiwanya. Sehingga, ia mampu menekankan kepada rakyatnya agar dengan sepenuh hati membiasakan diri bertindak laku yang mulia dan bertanggung jawab atas semua yang mereka lakukan.²⁴

Pesan terpenting dari al-Mawardi dalam buku Tashîl al-Nazhar adalah perintah untuk selalu bermusyawarah. Beliau menegaskan agar para penguasa selalu bermusyawarah dengan para ahl al-'ilm (ulama) sehingga keputusannya (kebijaksanaannya) benar-benar murni dan terhindar dari kesalahan. Keputusan individu tanpa musyawarah lebih berbahaya (tidak bijaksana) dalam beberapa hal dibandingkan keputusan yang dihasilkan dari musyawarah.

Bila pemikiran Machiavelli di atas dibandingkan dengan teori politik Islam, maka akan sangat bertolak belakang. Terutama pada masalah moralitas dan akhlaq dalam berpolitik atau berkuasa. Dalam Islam, tidak ada dikotomi antara politik dan etika atau moral, tetapi justru memadukannya. Bila diperhatikan, maka akan sangat berbeda sekali dengan apa yang telah disampaikan Machiavelli dalam bukunya *The Prince*. Nasehat al Mawardi lebih dekat dengan sifat alami manusia, dan hakikat politik dalam masalah hubungan manusia dan munculnya masyarakat. Sehingga teori al Mawardi ini bisa lebih baik dari pada Machiavelli.²⁵

3. kritik Al-Mawardi terhadap pemikiran Nicollo Machiavelli

Al-Mawardi dan Niccolò Machiavelli adalah dua pemikir politik yang muncul dari konteks budaya dan sejarah yang sangat berbeda, yang menghasilkan pandangan dan pendekatan yang kontras terhadap pemerintahan dan kekuasaan.²⁶

Al-Mawardi, seorang cendekiawan dan ahli hukum Islam dari masa Kekhalifahan Abbasiyah, menulis "Al-Ahkam al-Sultaniyyah," di mana ia menekankan pentingnya moralitas, etika, dan agama dalam pemerintahan. Dia percaya bahwa tujuan utama dari pemerintahan adalah untuk menerapkan syariat Islam, menjaga keadilan, dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Menurut Al-Mawardi, seorang pemimpin harus adil, jujur, dan bertanggung jawab kepada Allah dan rakyatnya. Dalam pandangan ini, legitimasi kekuasaan berasal dari ketaatan pada hukum Allah dan penerimaan oleh umat. Pemimpin yang adil dan menjalankan syariat dengan benar akan mendapatkan legitimasi dari Tuhan dan

23 Kurniati, Haris, and Abd. Rahman, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Upaya Penanggulangan Konflik Dan Bentrokan Fisik Di Indonesia', *Jurnal Hukum Islam*, 5.2 (2022), pp. 111–21.

²⁴ Sajjad H. Rizvi, *Ethics and Politics in Classical Islamic Thought: Al-Mawardi's Contribution* (Journal of Islamic Ethics, 2017).

²⁵ Patricia Crone, *Medieval Islamic Political Thought* (Edinburgh University Press, 2004).

²⁶ Maghfiroh.

rakyat. Agama, dalam pandangan Al-Mawardi, merupakan fondasi utama bagi pemerintahan, yang membedakan kekuasaan yang sah dan tidak sah.²⁷

Sebaliknya, Niccolò Machiavelli, seorang diplomat dan filsuf politik dari era Renaisans Italia, dalam karyanya yang terkenal "The Prince," menawarkan pandangan yang sangat pragmatis dan amoral mengenai politik. Machiavelli menekankan bahwa penguasa harus siap menggunakan segala cara, termasuk tipu daya dan kekerasan, untuk mempertahankan kekuasaan dan stabilitas negara. Bagi Machiavelli, hasil akhir membenarkan cara-cara yang digunakan (*the ends justify the means*), dan dia sering memisahkan agama dari politik, melihatnya lebih sebagai alat untuk mengendalikan rakyat daripada sebagai dasar moral dan etis bagi pemerintahan. Tujuan pemerintahan, menurut Machiavelli, adalah untuk mempertahankan stabilitas politik dan kekuasaan, sering kali dengan mengorbankan prinsip-prinsip moral dan etika. Dia menekankan pentingnya kekuatan militer dan kecakapan politik sebagai sumber utama legitimasi kekuasaan.²⁸

Maka Al-Mawardi mengkritik pemikiran Machiavelli, kritiknya kemungkinan besar mencakup beberapa aspek utama. Pertama, Al-Mawardi mengkritik pendekatan Machiavelli yang pragmatis dan amoral, karena menurutnya, pendekatan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengajarkan keadilan dan kebenaran. Al-Mawardi akan menekankan bahwa pemimpin harus bertindak sesuai dengan moralitas dan etika yang ditetapkan oleh agama, bukan hanya mempertimbangkan hasil akhir atau stabilitas politik. Kedua, Al-Mawardi menolak pandangan Machiavelli yang memisahkan agama dari politik, dan akan menegaskan bahwa agama harus menjadi dasar utama bagi pemerintahan yang sah. Ketiga, Al-Mawardi mengkritik fokus Machiavelli pada kekuasaan dan stabilitas sebagai tujuan utama pemerintahan, dan akan menegaskan bahwa tujuan pemerintahan seharusnya adalah menerapkan syariat Islam dan memastikan kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh rakyat.²⁹

Dengan demikian, kritik Al-Mawardi terhadap pemikiran Machiavelli akan berakar pada pandangan bahwa pemerintahan harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral, etika, dan agama, bukan pada pragmatisme dan amoralitas. Al-Mawardi akan mempertahankan bahwa hanya dengan mengikuti prinsip-prinsip tersebut, pemerintahan dapat mencapai legitimasi yang sejati dan keberhasilan jangka panjang dalam mengelola masyarakat.

KESIMPULAN

Pemikiran politik Al-Mawardi dan Niccolò Machiavelli. Al-Mawardi, dengan landasan kuat pada prinsip-prinsip Islam, menekankan pentingnya moralitas, etika, dan agama dalam pemerintahan. Bagi Al-Mawardi, keadilan dan kebenaran adalah fondasi yang tak terpisahkan dari kepemimpinan yang sah, dan legitimasi kekuasaan berasal dari ketaatan kepada hukum Allah serta penerimaan oleh rakyat. Sebaliknya, Machiavelli, dalam "The Prince," menawarkan pandangan yang pragmatis dan amoral, di mana penguasa dianjurkan untuk menggunakan segala cara, termasuk tipu daya dan kekerasan, demi stabilitas dan keberlangsungan kekuasaan.

Kritik Al-Mawardi terhadap pemikiran Machiavelli, meskipun bersifat hipotetis mengingat mereka hidup dalam konteks yang sangat berbeda, memberikan wawasan penting tentang bagaimana nilai-nilai etis dan spiritual dapat membentuk konsep politik. Al-Mawardi akan melihat pendekatan Machiavelli yang mengesampingkan moralitas dan agama sebagai sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang adil dan beradab. Dengan menekankan integritas, keadilan, dan tanggung jawab spiritual, Al-Mawardi menawarkan sebuah alternatif yang kuat terhadap pragmatisme Machiavellian, yang bisa dijadikan acuan bagi pemimpin kontemporer dalam mengelola negara.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran politik tidak hanya soal strategi dan taktik untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan, tetapi juga tentang mewujudkan nilai-nilai yang lebih tinggi dan universal yang mendasari kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan, pemikiran Al-Mawardi menawarkan pengingat bahwa keberhasilan sejati dalam pemerintahan harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etis yang

27 Rizki. Firdaus, Al-Mawardi Dan Politik Islam: Kritik Terhadap Konsep Machiavelli (Zaman, Jakarta, 2017).

28 Amin. Yusuf, Konsep Kepemimpinan Dalam Islam: Perspektif Al-Mawardi Dan Kritik Terhadap Machiavelli (Nuansa Cendekia, Bandung., 2016).

29 Pranowo.

kuat. Dengan demikian, pemikiran Al-Mawardi tidak hanya relevan dalam konteks sejarahnya, tetapi juga memberikan panduan yang berharga bagi kepemimpinan di masa kini dan masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mustofa, *Kritik Politik Machiavelli Dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Pemikiran Al-Mawardi* (Penerbit Mizan, Bandung, 2017)
- Ahmad, Khairul., *The Political Philosophy of Al-Mawardi: An Analytical Study* (Journal of Islamic Thought and Civilization, 2016)
- Al-Mawardi, *Al-Ahkām As-Ṣultāniyyah Wal Wilāyāt Ad-Dīniya* (Beirut: Dār al-Fikr, 1960)
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad, *Al-Ahkām Al-Sultaniyyah (The Ordinances of Government)*. (Reading: Garnet Publishing, 1996)
- Berlin, Isaiah, *Against the Current: Essays in the History of Ideas*. (Princeton: Princeton University Press., 1980)
- Black, Antony, *The History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present*. (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2001)
- Crone, Patricia., *Medieval Islamic Political Thought*. (Edinburgh: Edinburgh University Press., 2005)
- Crone, Patricia, *Medieval Islamic Political Thought* (Edinburgh University Press, 2004)
- Firdaus, Rizki., *Al-Mawardi Dan Politik Islam: Kritik Terhadap Konsep Machiavelli* (Zaman, Jakarta, 2017)
- Hassan, Ahmad., *Perbandingan Pemikiran Politik Barat Dan Islam: Al-Mawardi vs Machiavelli* (Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016)
- Hidayat, Abdul, *Perbandingan Pemikiran Politik Al-Mawardi Dan Niccolò Machiavelli* (Jurnal Studi Islam dan Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020)
- Kamali, Mohammad Hashim., *Principles of Islamic Jurisprudence*. (Cambridge: Islamic Texts Society., 1991)
- Kelemen, Marcel, *The Political Realism of Niccolò Machiavelli* (The Review of European Affairs, 2017)
- Kurniati, Haris, and Abd. Rahman, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Upaya Penanggulangan Konflik Dan Bentrok Fisik Di Indonesia', *Jurnal Hukum Islam*, 5.2 (2022), pp. 111–21
- Machiavelli, Niccolò, *The Discourses*. "Translated by Leslie J. Walker" (London: Penguin Books, 1970)
- Maghfiroh, Mauliana, *Al Mawardi's Social Contract Theory (Study of Al Mawardi's Political Thought)* (Journal of Islamic Studies and Humanities, 2023)
- Najemy, John M, *Machiavelli and Italy* (Journal of Modern Italian Studies, 2006)
- Pranowo, Agus, *Kritik Al-Mawardi Terhadap Machiavelli: Analisis Teori Politik Islam* (Jurnal Pemikiran Islam, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019)
- Qomaruddin, M., *Pemikiran Politik Al-Mawardi: Studi Kritis Terhadap Al-Ahkām As-Sultaniyyah* (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta., 2015)
- Rahmat, Fajar., *Relevansi Pemikiran Politik Al-Mawardi Di Era Modern* (Jurnal Politik Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang., 2021)
- Rizvi, Sajjad H., *Ethics and Politics in Classical Islamic Thought: Al-Mawardi's Contribution* (Journal of Islamic Ethics, 2017)
- Skinner, Quentin., *Machiavelli: A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2000)
- Sutomo, *Kontribusi Pemikiran Al-Mawardi Terhadap Konsep Kepemimpinan Dalam Islam* (Jurnal Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018)
- Yusuf, Amin., *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam: Perspektif Al-Mawardi Dan Kritik Terhadap Machiavelli* (Nuansa Cendekia, Bandung., 2016)
- Zaid, Arif., *Political Thought of Al-Mawardi: Theory and Practice* (International Journal of Humanities and Social Science, 2014)